

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGANTISIPASI KONFLIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA JAMBI 2024

Muhammad Ikhsan Irwansyah
NPP. 32.0195
Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.0195@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafar, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Direct regional head elections are one of the pillars of democracy in Indonesia, but are prone to causing social and political conflicts. Although the collaborative governance approach has been widely used in various public policy sectors, studies on its application in the context of anticipating regional election conflicts, especially in Jambi City ahead of the 2024 Regional Election, are still very limited. This gap is the basis for the need for this study. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in anticipating conflicts in the 2024 Jambi Mayoral Election. **Method:** This study uses a qualitative approach with a case study design in Jambi City. The Collaborative Governance theoretical framework from Ansell and Gash (2008) is used to examine the pattern of cooperation between the government, election organizers, security forces, community leaders, media, and academics. Data were collected through in-depth interviews with eight key informants, documentation, and literature studies. The analysis was carried out descriptively qualitatively through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The study found that the application of collaborative governance was not fully effective in anticipating regional election conflicts. Although a cross-sector communication forum has been formed and face-to-face dialogue between actors has been carried out, participation by several groups is still low and access to information is not evenly distributed. Dimensions of the collaboration process such as face-to-face dialogue and mutual understanding have gone quite well, with interim results in the form of a conducive social atmosphere and minimal reports of open conflict. Determining factors for success include commitment to the process, inclusive institutional design, and a history of positive cooperation between institutions. **Conclusion:** This study recommends increasing institutional capacity, community political literacy, and strengthening the conflict early warning system to support the sustainability of peaceful and democratic collaboration in the 2024 Jambi Mayoral Election.

Keywords: collaborative governance, regional election conflict, mayoral election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia, namun rawan menimbulkan konflik sosial dan politik. Meskipun pendekatan *collaborative governance* telah banyak digunakan dalam berbagai sektor kebijakan publik, kajian tentang penerapannya dalam konteks antisipasi konflik pilkada, khususnya di Kota Jambi menjelang Pilkada 2024, masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kota Jambi. Kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell

dan Gash (2008) digunakan untuk mengkaji pola kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, media, dan akademisi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa penerapan *collaborative governance* belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi konflik Pilkada. Meskipun telah dibentuk forum komunikasi lintas sektor dan dilaksanakan dialog tatap muka antaraktor, partisipasi beberapa kelompok masih rendah dan akses terhadap informasi belum merata. Dimensi proses kolaborasi seperti dialog tatap muka dan saling memahami berjalan cukup baik, dengan hasil sementara berupa suasana sosial yang kondusif dan minimnya laporan konflik terbuka. Faktor-faktor penentu keberhasilan meliputi komitmen terhadap proses, desain kelembagaan yang inklusif, serta riwayat kerja sama antar lembaga yang positif. **Kesimpulan:** Kolaborasi lintas aktor melalui pendekatan *collaborative governance* berpotensi mencegah konflik dalam pilkada apabila didukung oleh kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang terbuka, dan komunikasi yang transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan, literasi politik masyarakat, serta penguatan sistem peringatan dini konflik untuk mendukung keberlanjutan kolaborasi yang damai dan demokratis dalam Pilkada Wali Kota Jambi 2024.

Kata kunci: *collaborative governance*, konflik pilkada, pemilihan wali kota

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai dasar pemerintahan. Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi manifestasi utama dalam mewujudkan demokrasi tersebut. Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masyarakat Indonesia memiliki hak penuh dalam memilih pemimpinnya di tingkat lokal. Namun demikian, pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk potensi konflik sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi lokal.

Pilkada serentak tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial dalam sejarah politik Indonesia karena diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kompleksitas logistik, meningkatnya tensi politik, serta keterlibatan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda menjadikan penyelenggaraan pilkada rawan terhadap konflik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 telah memetakan potensi kerawanan ini di berbagai wilayah, termasuk di Kota Jambi, yang meskipun tergolong dalam kategori kerawanan sedang hingga rendah, tetap berpotensi mengalami gangguan dalam proses pemilihan.

Tingginya potensi konflik tersebut memerlukan strategi mitigasi yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga kolaboratif. Pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan dalam konteks ini, karena menekankan pentingnya kerja sama antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, masyarakat sipil, media, dan akademisi. Model ini menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil kolaboratif untuk mengantisipasi dan menangani konflik secara dini dan komprehensif.

Dalam konteks lokal, Kota Jambi telah memiliki pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip kolaboratif pada pilkada sebelumnya, seperti yang terjadi pada tahun 2008, di mana konflik potensial terkait data pemilih berhasil diselesaikan melalui kerja sama antarinstansi.

Meskipun demikian, belum ada kajian ilmiah yang secara khusus menganalisis bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam mengantisipasi konflik pada Pilkada Kota Jambi, khususnya menjelang pemilihan tahun 2024. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap praktik kolaborasi tersebut dalam konteks penyelenggaraan pilkada di daerah.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara empiris implementasi *collaborative governance* dalam menghadapi potensi konflik pada Pilkada Kota Jambi 2024. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis pola kolaborasi antaraktor, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan serta menjadi rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan dalam menciptakan pemilu yang damai, demokratis, dan bermartabat. Dalam proses pembangunan demokrasi lokal, peran kebijakan publik yang partisipatif dan inklusif menjadi penopang utama stabilitas pemerintahan daerah (Hamdi, 2014).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Studi mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks penguatan demokrasi, peningkatan partisipasi politik, serta penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Demikian pula, pendekatan *collaborative governance* telah menjadi perhatian dalam berbagai bidang kebijakan publik, seperti penanggulangan kemiskinan, pelayanan publik, hingga penanganan stunting. Namun, implementasi *collaborative governance* secara khusus dalam konteks antisipasi konflik pemilu, terutama di tingkat lokal seperti pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024, masih belum banyak diteliti.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek partisipasi politik atau evaluasi teknis penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, kajian yang secara eksplisit mengaitkan *collaborative governance* dengan strategi antisipatif terhadap konflik pilkada masih terbatas. Bahkan jika pun terdapat kajian terkait kolaborasi dalam pemilu, umumnya penelitian tersebut bersifat normatif, belum menyentuh dimensi praksis dan lokalitas secara spesifik.

Selain itu, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara khusus menelaah dinamika kerja sama multipihak dalam menyikapi potensi konflik yang dapat muncul selama proses Pilkada Kota Jambi. Padahal, daerah ini memiliki sejarah yang cukup stabil dalam pelaksanaan pilkada, namun tetap terindikasi memiliki tingkat kerawanan sedang menurut pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) oleh Bawaslu. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis bagaimana strategi kolaboratif diterapkan dalam konteks antisipasi konflik, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi tersebut.

Kesenjangan ini memperkuat urgensi dilakukannya penelitian yang tidak hanya menggambarkan peran para aktor dalam penyelenggaraan pilkada, tetapi juga menganalisis efektivitas mekanisme kolaboratif yang dibangun untuk meredam potensi konflik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena menawarkan pendekatan baru yang belum banyak dieksplorasi, serta memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan studi kolaborasi pemerintahan dan manajemen konflik di ranah pemilihan kepala daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *collaborative governance* telah banyak dilakukan pada berbagai konteks kebijakan publik. Namun, studi yang secara spesifik membahas penerapan *collaborative governance* dalam konteks antisipasi konflik pemilihan kepala daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar dalam mengembangkan penelitian ini.

Penelitian oleh Nahampun (2023) menelaah pelaksanaan *collaborative governance* antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut belum optimal akibat kurangnya antusiasme masyarakat dan lemahnya kerja sama antarinstansi dalam memberikan pendidikan politik.

Rahmadiani & Faisal (2024) meneliti penerapan *collaborative governance* dalam program penanganan stunting di Kota Pontianak. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat pertemuan rutin yang membangun komitmen bersama, keterlibatan sektor swasta masih belum terstruktur secara formal dan cenderung tentatif.

Selanjutnya, Dito & Martini (2024) mengkaji peran *collaborative governance* dalam meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor komunitas dan media sudah berjalan baik, tetapi keterlibatan aktor swasta masih belum optimal, sehingga pelaksanaan kolaborasi belum mencapai efektivitas maksimal.

Penelitian oleh Teka (2021) mengangkat pentingnya desain *collaborative governance* dalam mencegah malpraktik elektoral, berdasarkan studi kasus pencalonan di DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua. Penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antarlembaga sebagai strategi untuk memperkuat integritas pemilu di berbagai tingkatan.

Terakhir, penelitian oleh Arifulloh (2016) menyoroti pentingnya pelaksanaan pilkada yang demokratis, damai, dan bermartabat. Ia menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen krusial dalam kesuksesan pemilu, dan tanpa keterlibatan publik, seluruh upaya pemerintah dalam menjaga kualitas pemilu akan sia-sia.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian *collaborative governance* telah diaplikasikan dalam berbagai isu kebijakan, namun belum secara spesifik dikaji dalam konteks antisipasi konflik pilkada, khususnya pada skala lokal seperti Pemilihan Wali Kota Jambi 2024. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dari sisi fokus kajian dan konteks wilayah, serta berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas kolaborasi multipihak dalam mendukung stabilitas demokrasi lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) yang terletak pada fokus kajian terhadap implementasi *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi tahun 2024, yang hingga saat ini belum banyak dikaji secara mendalam oleh peneliti lain. Pendekatan kolaboratif dalam konteks pencegahan konflik pilkada khususnya di wilayah Kota Jambi menjadi tema yang belum terangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Berbeda dengan penelitian Nahampun (2023) yang menyoroti kolaborasi antara Kesbangpol dan KPU dalam peningkatan partisipasi politik, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek partisipasi, tetapi secara khusus menganalisis kolaborasi dalam konteks mitigasi konflik pilkada. Penelitian Rahmadiani & Faisal (2024) dan Dito & Martini (2024) juga hanya membahas pelaksanaan *collaborative governance* dalam isu kesehatan dan pendidikan politik, tanpa menjangkau aspek strategis konflik elektoral.

Penelitian ini juga berbeda secara konteks wilayah. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengambil lokasi di luar Provinsi Jambi, sementara studi ini dilakukan secara spesifik di Kota Jambi dengan pendekatan studi kasus lokal. Konteks lokal Kota Jambi yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) rendah namun tetap memiliki potensi konflik tersembunyi, memberikan sudut pandang baru yang belum dieksplorasi dalam studi sebelumnya.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis utama, dengan fokus pada dimensi-dimensi proses

kolaboratif, kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif yang diterapkan pada konteks lokal pemilihan kepala daerah. Penelitian sebelumnya pada umumnya hanya memanfaatkan sebagian komponen teori tersebut, atau tidak membedahnya secara utuh dalam kerangka manajemen konflik pemilu.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini tidak hanya terletak pada fokus substansi yang spesifik dan lokasi kajian yang baru, tetapi juga pada pendekatan konseptual yang komprehensif serta kontribusi aplikatif dalam menawarkan strategi antisipasi konflik pilkada berbasis kolaborasi multipihak di tingkat pemerintahan daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi tahun 2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kota Jambi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses, interaksi, dan dinamika antar aktor dalam implementasi *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik Pilkada. Metode ini sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial-politik yang kompleks dan kontekstual, seperti potensi konflik dalam pemilihan kepala daerah yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan berbeda.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang yang dianggap sebagai informan kunci, yaitu perwakilan dari Badan Kesbangpol Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi, Polresta Jambi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu, media lokal, dan akademisi dari Universitas Jambi. Pemilihan informan ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam proses penyelenggaraan Pilkada serta posisi strategisnya dalam pengelolaan atau pengawasan potensi konflik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kota Jambi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) sebagai alat analisis, dengan fokus pada lima elemen utama, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Model ini digunakan untuk menilai efektivitas kolaborasi dalam mengantisipasi konflik Pilkada secara komprehensif. Pemilihan metode kualitatif memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara mendalam melalui pendekatan interpretatif yang relevan dalam studi pemerintahan (Nurdin & Hartati, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini peneliti akan menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan pada bab 1 yaitu bagaimana *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024.

3.1. Collaborative Governance dalam Mengantisipasi Konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024

Penelitian ini mengkaji proses kolaborasi multi helix dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024, di mana Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjalin kerja sama dengan berbagai aktor seperti KPU, Bawaslu, Polresta, LSM pemerhati pemilu, akademisi, tokoh masyarakat, dan media lokal. Menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat dimensi (kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi) penelitian ini menemukan bahwa koordinasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas hubungan antar aktor. Masing-masing pihak memainkan peran strategis, mulai dari penyelenggaraan dan pengawasan pilkada, menjaga ketertiban, memberikan edukasi politik, hingga menyebarkan informasi secara terbuka, di mana semua pihak berada dalam posisi yang setara dan saling berhubungan untuk menciptakan pemilu yang damai dan demokratis.

a. Kondisi Awal

Teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menawarkan kerangka konseptual untuk memahami proses kolaboratif antara aktor-aktor publik dan non-publik dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Terdapat empat dimensi utama dalam model ini, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam keberhasilan kolaborasi.

Kondisi awal merujuk pada konteks atau latar belakang awal yang mempengaruhi kesiapan para aktor untuk terlibat dalam kolaborasi. Kondisi ini mencakup tiga aspek penting, yakni ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya antaraktor, insentif untuk berkolaborasi, serta riwayat hubungan sebelumnya, apakah lebih banyak diwarnai konflik atau kerja sama. Ketimpangan yang besar cenderung menghambat kepercayaan, sehingga diperlukan adanya mekanisme penyeimbang untuk menciptakan titik temu yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Manajemen pemerintahan daerah yang efisien menuntut adanya koordinasi antarpemangku kepentingan untuk mencegah konflik yang merusak tatanan politik lokal (Hamid, 2018).

Desain kelembagaan berkaitan dengan aturan, struktur, dan mekanisme formal yang mengatur proses kolaborasi. Keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi menjadi prinsip utama dalam membentuk desain kelembagaan yang kredibel. Proses kolaboratif harus diwadahi dalam forum yang sah dan difasilitasi dengan aturan main yang jelas agar para aktor memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses berlangsung.

Kepemimpinan fasilitatif berperan sebagai pengarah dan penjaga jalannya kolaborasi. Pemimpin dalam konteks ini tidak mendominasi, tetapi memfasilitasi dialog, mengelola dinamika kelompok, dan menjamin bahwa semua pihak memiliki ruang partisipasi yang setara. Kepemimpinan ini juga bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan antaraktor dan memastikan bahwa proses berjalan secara inklusif, efektif, serta menghasilkan keputusan yang kredibel.

Proses kolaborasi adalah inti dari pelaksanaan model ini. Ansell dan Gash (2008) menekankan lima elemen penting dalam proses kolaboratif, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Proses ini bersifat interaktif dan berlangsung secara bertahap, di mana setiap aktor diharapkan aktif dalam menyampaikan pandangan, mendengarkan, serta mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi. Proses ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kesediaan untuk saling memahami.

Secara keseluruhan, keempat dimensi dalam teori *collaborative governance* saling terkait dan membentuk dasar yang kuat bagi terciptanya kolaborasi yang efektif. Model ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan yang kompleks, di mana keberhasilan

kebijakan tidak hanya ditentukan oleh satu aktor tunggal, melainkan hasil dari kerja sama multipihak yang terkoordinasi dan berbasis kepercayaan. Dalam penerapannya, keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh keselarasan antara konteks awal, struktur pendukung, kepemimpinan yang inklusif, dan proses interaksi yang berkelanjutan.

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* karena menjadi fondasi yang menentukan legitimasi, aturan main, dan keterbukaan dalam proses kolaborasi. Ilmu pemerintahan modern menempatkan desain kelembagaan sebagai kunci keberhasilan dalam praktik kolaboratif lintas actor (Labolo, 2011). Dalam konteks Pilkada Kota Jambi 2024, desain kelembagaan tercermin dalam bagaimana pemerintah daerah sebagai inisiator kolaborasi menciptakan ruang interaksi yang inklusif, membangun forum komunikasi antarpihak, menetapkan aturan dasar yang mengikat, serta menjamin transparansi selama proses berlangsung. Keberhasilan kolaborasi dalam mengantisipasi konflik tidak hanya ditentukan oleh kemauan para aktor, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang mendukung partisipasi setara, terbuka, dan terarah. Dalam konteks internasional, desain kelembagaan yang efektif sangat bergantung pada kejelasan peran, legitimasi partisipan, dan proses deliberatif yang menjamin inklusivitas dan akuntabilitas demokratis (Bianchi *et al.* 2021).

Partisipasi Inklusif menjadi indikator utama dalam desain kelembagaan, yang menekankan keterlibatan semua aktor dari beragam latar belakang dalam forum kolaborasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktor formal seperti Kesbangpol, KPU, Bawaslu, dan Polresta Jambi secara aktif menjalankan perannya sesuai kewenangan masing-masing. Akademisi, media, LSM, dan tokoh masyarakat juga turut berkontribusi dalam kapasitasnya masing-masing meskipun tingkat partisipasinya bervariasi, tergantung pada sumber daya dan posisi strategis mereka. Inklusivitas ini menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan sesuai prinsip penta helix, dengan seluruh aktor berperan sesuai peran sosial dan institusionalnya.

Forum Komunikasi menjadi wadah koordinasi yang vital dalam menyatukan visi, menyelesaikan perbedaan, serta menjaga keterpaduan langkah antar aktor. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan unsur masyarakat terlibat dalam berbagai forum, baik yang bersifat formal seperti rapat koordinasi dan pleno terbuka, maupun informal seperti diskusi antarjaringan profesi. Forum ini tidak hanya menjadi media pertukaran informasi, tetapi juga wahana peneguhan komitmen bersama dalam menciptakan pilkada yang damai, tertib, dan demokratis.

Peraturan Dasar yang Jelas menjadi fondasi legal bagi aktor formal untuk menjalankan perannya. Kesbangpol, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian bekerja berdasarkan regulasi resmi seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Sementara itu, aktor non-pemerintah seperti tokoh masyarakat, LSM, media, dan akademisi tidak memiliki dasar hukum formal untuk berpartisipasi, tetapi berperan atas dasar kesadaran etis, komitmen terhadap demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Kesenjangan dalam legitimasi formal ini menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan yang lebih inklusif terhadap aktor non-formal.

Transparansi Proses menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah konflik. Setiap aktor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, menunjukkan komitmen untuk terbuka dalam menyampaikan informasi, menerima kritik, serta memfasilitasi akses publik terhadap proses pilkada. KPU dan Bawaslu menegaskan prinsip transparansi sebagai bagian dari asas *luber-jurdil*, sementara media berperan dalam menyebarkan informasi secara objektif. Meski ada

pembatasan tertentu pada isu sensitif, transparansi tetap dijaga sebagai nilai dasar dalam kolaborasi.

Secara keseluruhan, dimensi desain kelembagaan dalam konteks Pilkada Kota Jambi 2024 menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor didukung oleh struktur yang inklusif, forum komunikasi yang aktif, dasar hukum yang kuat (khususnya bagi aktor formal), dan proses yang transparan. Keberadaan sistem kelembagaan yang terbuka dan adaptif memungkinkan seluruh aktor, baik formal maupun non-formal, untuk menjalankan perannya secara sinergis dalam mengantisipasi potensi konflik pilkada, sekaligus memperkuat legitimasi dan akuntabilitas demokrasi lokal.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan dimensi penting dalam *collaborative governance* karena berfungsi sebagai penggerak utama proses kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor. Dalam konteks Pilkada Kota Jambi 2024, kepemimpinan jenis ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi yang konstruktif, mengelola perbedaan, dan memastikan semua pihak memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif dan setara. Pemimpin yang berhasil dalam konteks *collaborative governance* adalah mereka yang mampu mengelola dinamika politik lokal dan membangun konsensus lintas batas institusi (Bazurli & Campomori, 2025). Kepemimpinan fasilitatif tidak bersifat dominatif, melainkan menekankan pada dialog, pengelolaan kapasitas, dan pemberdayaan semua aktor agar dapat membuat keputusan bersama yang kredibel dan berkelanjutan.

Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi menjadi indikator pertama dalam kepemimpinan fasilitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol, KPU, Bawaslu, hingga Polresta Jambi memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan memfasilitasi proses kolaborasi. Mereka bertanggung jawab dalam menciptakan koordinasi yang menyeluruh dan menyatukan langkah antar aktor untuk mencegah konflik. Sementara itu, aktor non-pemerintah seperti tokoh agama, media, LSM, dan akademisi turut berperan sebagai mitra aktif dalam forum diskusi dan sosialisasi publik. Kehadiran mereka menambah kedalaman perspektif serta memperkuat jaringan sosial yang mendukung pilkada damai dan demokratis.

Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis menjadi indikator kedua yang menunjukkan bagaimana masing-masing aktor menjaga profesionalitas dan integritas selama proses kolaborasi. ASN Bakesbangpol mengedepankan koordinasi berbasis tupoksi, KPU dan Bawaslu menegakkan standar transparansi dan integritas, Polri menjaga netralitas sebagai bentuk kepercayaan publik, sementara LSM dan media menekankan pada pelatihan internal serta akurasi informasi. Kredibilitas teknis ini juga ditunjukkan oleh akademisi yang memberikan dukungan melalui kajian dan riset, meskipun partisipasi mereka bersifat non-formal. Keseluruhan upaya ini mencerminkan pentingnya kompetensi dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi yang efektif.

Pemberdayaan dalam pengambilan keputusan menjadi indikator ketiga, di mana setiap aktor didorong untuk menjalankan peran dan fungsinya secara otonom namun tetap dalam bingkai kesepahaman bersama. Kolaborasi yang dibangun memberikan ruang kepercayaan, saling tukar informasi, dan pembagian peran berdasarkan wewenang kelembagaan. Baik aktor formal seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan, maupun aktor non-formal seperti tokoh masyarakat dan media, menyatakan bahwa kolaborasi memperkuat kesamaan tujuan, memperjelas arah tindakan, dan menumbuhkan legitimasi keputusan bersama. Hal ini mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pilkada yang kredibel dan inklusif.

Secara keseluruhan, dimensi kepemimpinan fasilitatif dalam Pilkada Kota Jambi 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kemampuan aktor dalam memimpin secara terbuka, memberdayakan, dan menjaga kredibilitas bersama. Kepemimpinan seperti ini berperan strategis dalam membangun kepercayaan antar pihak, menciptakan ruang dialog yang sehat, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip demokrasi yang damai dan partisipatif.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan inti dari pelaksanaan *collaborative governance* karena menjadi ruang interaksi dinamis antara berbagai aktor yang terlibat. Dalam konteks Pilkada Kota Jambi 2024, proses kolaborasi melibatkan serangkaian kegiatan partisipatif, dialog terbuka, pembangunan kepercayaan, dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan. Proses ini tidak hanya mencerminkan mekanisme kerja sama yang operasional, tetapi juga menegaskan nilai-nilai demokratis dalam menciptakan pilkada yang damai dan inklusif. Lima indikator utama yang dianalisis untuk melihat efektivitas proses kolaborasi ini adalah: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasil sementara.

Dialog tatap muka menjadi awal dari seluruh proses kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara, semua aktor terlibat aktif dalam berbagai forum seperti rapat koordinasi, sosialisasi, hingga kampanye pilkada damai. Interaksi langsung ini tidak hanya memungkinkan pertukaran ide dan informasi, tetapi juga menciptakan keterbukaan serta mempererat hubungan antarpihak. Dalam praktik kolaboratif lintas sektor, keberhasilan proses sangat ditentukan oleh interaksi sosial yang berkelanjutan serta kepercayaan interpersonal antaraktor (Ratner *et al*, 2021). Baik pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan, hingga masyarakat sipil memanfaatkan dialog ini untuk menyamakan visi, menyampaikan aspirasi, serta mengantisipasi potensi konflik sejak dini.

Membangun kepercayaan menjadi landasan penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Pemerintah sebagai aktor sentral berperan dalam menciptakan iklim yang inklusif dan transparan, sementara KPU dan Bawaslu memperkuat kepercayaan melalui sosialisasi dan keterbukaan informasi. Polri menjaga netralitas dan profesionalisme, sementara media, LSM, serta akademisi memperkuat kredibilitas dengan pemberitaan dan partisipasi yang jujur. Seluruh aktor menyadari bahwa tanpa kepercayaan, kolaborasi akan rapuh dan sulit mencapai tujuan bersama.

Komitmen terhadap proses terlihat dari konsistensi dan ketekunan para aktor dalam menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Bakesbangpol, KPU, dan Bawaslu menunjukkan kesungguhan dalam menjaga ketertiban pilkada, sementara Polresta Jambi menyatakan bahwa komitmen dalam pelayanan publik menjadi kewajiban moral dan institusional. Tokoh masyarakat, media, dan LSM menyuarakan komitmen mereka dalam bentuk edukasi politik, penyampaian informasi yang akurat, serta keterlibatan aktif dalam mendukung demokrasi lokal yang sehat.

Saling memahami muncul dari kesadaran akan peran dan fungsi masing-masing aktor, serta adanya keinginan untuk menghargai perbedaan pandangan demi tujuan bersama. Informan menyatakan bahwa pemahaman terhadap latar belakang, tanggung jawab, dan ekspektasi setiap pihak membantu mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Proses ini mendorong sinergi yang lebih efektif karena setiap aktor merasa dihargai, dipahami, dan diberdayakan secara setara.

Hasil sementara dari proses kolaborasi menunjukkan bahwa Pilkada Kota Jambi 2024 sejauh ini berlangsung secara aman, tertib, dan minim konflik. Hasil ini dinilai sebagai buah dari kerja sama yang terbangun dengan baik antar aktor formal dan non-

formal. Beberapa capaian yang diakui oleh para informan antara lain adalah terciptanya suasana sosial yang kondusif, tidak adanya laporan kecurangan besar, dan meningkatnya transparansi informasi. Semua pihak menyepakati bahwa pencapaian ini merupakan indikasi kuat bahwa kolaborasi telah berjalan sesuai arah.

Secara keseluruhan, proses kolaborasi dalam Pilkada Kota Jambi 2024 menunjukkan kualitas hubungan kerja sama yang solid, berkelanjutan, dan berbasis kepercayaan. Kombinasi antara komunikasi langsung, keterbukaan informasi, kesamaan visi, serta keterlibatan lintas sektor menjadi faktor kunci keberhasilan kolaborasi ini. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa *collaborative governance* tidak hanya penting dalam teori, tetapi nyata berperan dalam menjaga stabilitas demokrasi lokal melalui praktik kolaboratif yang adaptif dan inklusif.

Setelah membahas dimensi-dimensi dalam *collaborative governance* seperti desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, penting untuk memahami bahwa efektivitas dari kolaborasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang melekat pada aktor serta lingkungan sosial-politik tempat mereka beroperasi. Dalam konteks Pemilihan Wali Kota Jambi 2024, terdapat sejumlah faktor kunci yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengantisipasi potensi konflik selama tahapan pilkada berlangsung.

Salah satu faktor utama adalah kapasitas kelembagaan, yang mencerminkan kemampuan institusi seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan Polresta dalam menjalankan peran secara terkoordinasi, netral, dan profesional. Kelembagaan yang kuat memungkinkan desain kolaborasi berjalan sistematis, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan menjamin terlaksananya mekanisme pengambilan keputusan yang kredibel. Di sisi lain, tingkat kepercayaan antar aktor menjadi fondasi emosional dan psikologis yang menentukan sejauh mana kerja sama dapat terbangun secara harmonis. Ketika kepercayaan terbangun, komitmen terhadap kesepakatan bersama juga akan meningkat, dan potensi konflik cenderung dapat diredam lebih dini.

Partisipasi masyarakat sipil juga terbukti sangat berpengaruh dalam memperkuat efektivitas *collaborative governance*. Pembangunan kapasitas institusional menjadi elemen mediasi penting yang memperkuat dampak kolaborasi terhadap hasil kebijakan yang berkeadilan (Uddin *et al.*, 2023). LSM, media, pemuda, dan tokoh masyarakat berperan sebagai pengawas sosial yang independen sekaligus penyambung komunikasi antara pemerintah dan warga. Keberadaan forum dialog dan mediasi yang tersedia secara formal maupun informal seperti rapat koordinasi, desk pilkada, dan musyawarah bersama, menjadi arena penting untuk menyalurkan aspirasi, menyamakan persepsi, dan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa eskalasi.

Lebih lanjut, komitmen politik dari elit juga berperan krusial. Ketika para politisi menjaga etika dan tidak menggunakan isu-isu sensitif untuk meraih keuntungan politik, stabilitas sosial dapat dipertahankan. Hal ini sejalan dengan pentingnya akses terhadap informasi, di mana keterbukaan dan transparansi prosedur pemilu melalui kanal digital, media resmi, maupun sosialisasi langsung, menjadi alat penguat kepercayaan publik. Terakhir, pengaruh media sebagai aktor informasi turut menentukan arah opini publik. Pemberitaan yang netral dan edukatif berperan besar dalam meredam ketegangan, sedangkan pemberitaan yang provokatif justru dapat memicu polarisasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan *collaborative governance* dalam mencegah konflik pilkada bukan hanya ditentukan oleh kerangka teoritik atau desain kolaborasi semata, tetapi sangat bergantung pada interaksi dinamis dari berbagai faktor kontekstual yang melibatkan kapasitas kelembagaan, relasi sosial-politik, serta keterlibatan aktif semua unsur masyarakat. Sinergi yang solid, komunikasi yang terbuka, dan kesepahaman akan tujuan bersama menjadi

penentu utama dalam menjaga ketertiban dan keberhasilan Pilkada Kota Jambi 2024 secara demokratis, damai, dan bermartabat.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024 telah berjalan melalui pola kolaborasi multihelix yang melibatkan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, masyarakat sipil, media, dan akademisi. Dalam pendekatan empiris pemerintahan, hasil temuan harus diletakkan dalam kerangka hubungan kausal yang kritis antara aktor, struktur, dan hasil kebijakan (Simangunsong, 2019). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Teka (2021) yang menekankan pentingnya desain kolaboratif antar lembaga untuk mencegah malpraktik elektoral, khususnya pada proses pencalonan di NTT dan Pilkada Sabu Raijua. Sama halnya dengan temuan Teka, penelitian ini juga menunjukkan bahwa forum-forum komunikasi antarlembaga memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi bersama dan mencegah konflik horizontal.

Berbeda dengan temuan penelitian Nahampun (2023) yang mencatat lemahnya antusiasme masyarakat dan kurang optimalnya kolaborasi antara KPU dan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Timur, penelitian ini justru menemukan bahwa tingkat partisipasi aktor dalam proses kolaboratif relatif tinggi, terutama dari unsur pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bahkan media dan akademisi turut menunjukkan inisiatif aktif dalam edukasi pemilih serta pemberitaan yang konstruktif, meskipun peran aktor non-pemerintah lainnya seperti LSM dan tokoh agama masih terbatas karena kendala sumber daya.

Temuan ini juga berbeda dari studi Rahmadiani & Faisal (2024) tentang penanganan stunting di Kota Pontianak, yang mengungkap lemahnya struktur partisipatif sektor swasta dalam forum kolaborasi. Dalam penelitian ini, justru ditemukan bahwa seluruh aktor menjalankan perannya sesuai dengan fungsi kelembagaannya, dan bahkan aktor non-formal seperti media dan tokoh masyarakat mampu mengambil peran signifikan meskipun tidak memiliki dasar hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemilu, urgensi bersama menjadi pendorong kuat terciptanya koordinasi lintas aktor, tanpa bergantung pada regulasi formal.

Sama halnya dengan temuan Dito & Martini (2024) yang menekankan peran komunitas dan media dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula di Purworejo, penelitian ini juga mencatat bahwa media memainkan peran penting dalam menjaga transparansi proses pilkada dan mencegah penyebaran hoaks. Namun berbeda dari penelitian tersebut, dalam konteks Kota Jambi, partisipasi LSM tidak terlalu kuat dan lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif, yang memperlihatkan adanya tantangan dalam menyelaraskan kapasitas dan peran antaraktor.

Temuan ini juga memperkuat argumen Arifulloh (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga integritas pemilu. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengidentifikasi bahwa partisipasi tersebut harus difasilitasi melalui forum kolaborasi yang terstruktur, dialog tatap muka, dan transparansi yang dijamin oleh penyelenggara pemilu serta aktor pemerintah.

Secara konseptual, penelitian ini memperluas kerangka *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) dengan membuktikan bahwa keempat dimensi utamanya, kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, benar-benar terjadi di lapangan dan saling memperkuat. Hal ini berbeda dengan sebagian besar studi sebelumnya yang hanya menggunakan sebagian dimensi dari teori tersebut. Dalam konteks Pilkada Kota Jambi, keempat dimensi tersebut berjalan secara simultan dan saling mendukung, dengan indikator seperti dialog tatap muka, penguatan kepercayaan, komitmen proses, pemahaman bersama, hingga pencapaian hasil kolaboratif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menguatkan beberapa penelitian sebelumnya, tetapi juga menolak sebagian hasil yang menyatakan bahwa kolaborasi antaraktor dalam penyelenggaraan pemilu seringkali lemah akibat rendahnya partisipasi atau minimnya kapasitas kelembagaan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik lokal Kota Jambi yang memiliki sejarah stabilitas politik dan komitmen kelembagaan yang relatif kuat. Oleh karena itu, kontribusi utama dari penelitian ini adalah pada pembuktian bahwa *collaborative governance* dapat berjalan efektif dalam konteks lokal apabila ditopang oleh desain kelembagaan yang inklusif, kepemimpinan yang memfasilitasi, dan forum komunikasi yang konsisten. Sejalan dengan itu, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh konteks politik lokal yang dinamis dan pola distribusi kekuasaan dalam jaringan aktor (Kim *et al.*, 2023).

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat jalannya kolaborasi. Kesbangpol secara aktif memfasilitasi pertemuan, menghubungkan aktor-aktor strategis, serta menjaga keterbukaan komunikasi di antara instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Forum-forum komunikasi seperti rapat koordinasi dan kampanye pemilu damai juga terbukti efektif menjadi ruang tukar informasi dan konsolidasi tindakan bersama dalam meredam potensi konflik.

Di sisi lain, ditemukan pula hambatan berupa keterbatasan partisipasi dari aktor non-pemerintah seperti LSM dan tokoh masyarakat. Keterlibatan mereka cenderung bersifat insidental dan belum terintegrasi secara struktural dalam proses pengambilan keputusan. Minimnya dukungan sumber daya serta tidak adanya payung hukum yang secara eksplisit mengatur peran mereka menyebabkan kontribusi mereka lebih bergantung pada inisiatif pribadi dan pendekatan informal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi normatif dan partisipasi praktis yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Temuan menarik lainnya adalah peran media lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor penyeimbang opini publik. Melalui pemberitaan yang netral dan edukatif, media turut menjaga suasana politik tetap kondusif, mencegah penyebaran hoaks, dan memperkuat transparansi. Meskipun tidak memiliki dasar hukum formal dalam pelibatan pemilu, media dan akademisi tetap berkontribusi aktif karena adanya legitimasi sosial dan kesadaran demokratis yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan moral dan kredibilitas institusional dapat melengkapi kekosongan regulasi formal dalam praktik kolaboratif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam mengantisipasi konflik pada Pemilihan Wali Kota Jambi 2024 berjalan secara efektif melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, media, LSM, dan akademisi. Kolaborasi ini berlangsung dalam kerangka kemitraan yang dibangun atas dasar saling percaya, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama terhadap tujuan bersama, sebagaimana tercermin dalam dimensi-dimensi teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008).

Keberhasilan kolaborasi ini turut didukung oleh kepemimpinan fasilitatif dari Badan Kesbangpol Kota Jambi sebagai aktor sentral yang memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan menginisiasi forum komunikasi. Selain itu, forum-forum dialog, keterlibatan aktif media, serta transparansi informasi menjadi elemen penting dalam menciptakan suasana politik yang kondusif. Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya hambatan partisipatif,

khususnya dari aktor non-pemerintah yang keterlibatannya belum sepenuhnya terstruktur secara kelembagaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya terkait pentingnya tata kelola kolaboratif dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kesetaraan peran antaraktor, dan dukungan terhadap mekanisme komunikasi terbuka. Kolaborasi yang inklusif dan adaptif terbukti mampu mencegah eskalasi konflik dan memperkuat demokrasi lokal secara partisipatif dan damai.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain durasi pelaksanaan yang relatif singkat sehingga belum mampu mengamati dinamika kolaborasi secara menyeluruh pada seluruh tahapan Pilkada Wali Kota Jambi 2024. Selain itu, keterbatasan jumlah dan variasi informan menyebabkan partisipasi masyarakat akar rumput belum tergambarkan secara utuh. Akses terhadap dokumen internal kelembagaan juga terbatas, sehingga analisis terhadap dimensi kelembagaan dan legitimasi keputusan dalam kolaborasi menjadi kurang mendalam. Temuan dalam penelitian ini karenanya perlu dipahami dalam konteks ruang dan waktu yang spesifik, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas dan longitudinal.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal agar dapat menangkap dinamika *collaborative governance* secara lebih utuh di seluruh tahapan pemilu. Selain itu, perlu diperluas cakupan informan, terutama dari kelompok masyarakat akar rumput, pemilih muda, dan komunitas rentan guna memperoleh perspektif yang lebih inklusif. Studi komparatif antar daerah juga dapat menjadi arah pengembangan untuk melihat bagaimana kolaborasi berjalan dalam konteks sosial-politik yang berbeda, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan adaptif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan, termasuk pejabat struktural, staf penyelenggara pemilu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, perwakilan media, LSM, serta akademisi yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan data yang sangat berharga. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kolaborasi lintas aktor guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang damai, demokratis, dan bermartabat di Kota Jambi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansell, C., & Gash, J. (Eds.). (2008). *Handbook on theories of governance*. Edward Elgar Publishing.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1376>
- Bazurli, R., & Campomori, F. (2025). Collaborative governance in politicized times: The battle over asylum policies in Italian cities. *Policy and Society*, puae038. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae038>
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: Models, experiences, and challenges. *Policy and Politics*, 49(4), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Dito, D. D., & Martini, A. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH* (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18965>
- Kim, H., Kim, H., & Woosnam, K. M. (2023). Collaborative governance and conflict management in cultural heritage-led regeneration projects: The case of urban Korea. *Habitat International*, 139, 102767. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102767>
- Nahampun, A. S. P. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA KESBANGPOL DAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14973>
- Rahmadiani, N. F., & Faisal, M. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI STUNTING MELALUI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT* (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17126>
- Ratner, B. D., Larson, A., Sarmiento Barletti, J. P., & EIDidi, H. (2021). Multi-stakeholder platforms for natural resource governance: Lessons from eight landscape-level cases. *Ecology and Society*, 27(2), 202. <https://doi.org/10.5751/ES-13168-270202>
- Teka, S. S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada: Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 1-27. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.44>
- Uddin, M. Z., Yuan, X. Y., Khan, N. U., & Han, H. (2023). Author correction: Linking local collaborative governance and public service delivery: Mediating role of institutional capacity building. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02505-0>